

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4727/MD-D/SD-S1/2021

**IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN PANITIA
PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) DI
ARAB SAUDI TAHUN 2019 OLEH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

OLEH :

JOYO SUSANTO

NIM.11744102557

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Joyo Susanto
NIM : 11744102557
Judul : Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Tahun 2019 Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Dekan,

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Dr. Toni hartono, M.Si
NIP. 19780605 200701 1 024

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III

Penguji IV

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Drs. H. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Persetujuan Pembimbing Skripsi

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Joyo Susanto
Nim : 11744102557
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : "Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Tahun 2019 Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S. Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP. 19811118 200901 1 006

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP. 19811118 200901 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

J. H.R. Socbrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampar Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Joyo Susanto
NIM : 11744102557

Judul : Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Di Arab Saudi
Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 November 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 26 November 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji II

Drs. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Joyo Susanto

NIM : 11744102557

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Tahun 2019 Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, .. Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Joyo Susanto

NIM.11744102557

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Joyo Susanto

kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Joyo Susanto**, NIM. 11744102557 dengan judul **"Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Tahun 2019 Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassamua'alaikumWr. Wb.

Pembimbing

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP. 19811118 200901 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Joyo Susanto
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul : Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Tahun 2019 Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Rekrutmen merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam mencari Sumber Daya Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengadakan suatu rekrutmen PPIH di Arab Saudi dengan menerapkan sistem baru dan akan memperkenalkan sistem baru yang akan menjadi tanggung jawab PPIH di Arab Saudi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem dan implementasinya dalam rekrutmen PPIH di Arab Saudi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memaparkan sistem rekrutmen PPIH di Arab Saudi. Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk memaparkan fenomena atau kegiatan yang dilakukan dalam mencari dan menemukan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan. Rekrutmen PPIH di Arab Saudi tahun 2019 berpedoman pada Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah no 17 tahun 2019 tentang pedoman rekrutmen haji di Indonesia. Dalam keputusan tersebut terdapat dua sistem yang digunakan dalam rekrutmen yaitu sistem penunjukan dan sistem seleksi. Namun implementasinya pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Riau hanya menggunakan sistem seleksi karena penambahan kuota jamaah haji seluruhnya diberikan kepada jamaah haji. Sedangkan dalam sistem seleksi terdapat tiga tahap proses seleksi yang dilakukan yaitu seleksi administrasi, seleksi CAT dan seleksi wawancara. Tiga tahap tersebut memiliki persentase yang berbeda, seleksi administrasi memiliki persentase sebesar 30%, seleksi CAT 55% dan seleksi wawancara 15%.

Kata Kunci : *Sistem, rekrutmen, PPIH di Arab Saudi.*

UIN SUSKA RIAU



ABSTRACT

Name : Joyo Susanto
Major : Management of Dakwah
Title : Implementation of the Recruitment System for the Hajj Organizing Committee (PPIH) in Saudi Arabia in 2019 by the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau Province

Recruitment is a crucial step in the process of pinpointing Human Resources. The Riau Province Regional Office of the Ministry of Religion held a recruitment of PPIH in Saudi Arabia by implementing a new system and will introduce a new system that will be accountable for PPIH in Saudi Arabia. The main issue of this research is how the scheme and its implementation in PPIH recruitment in Saudi Arabia work. The aim is to discover about and explain the Saudi PPIH recruitment system. The researcher employed qualitative methods, such as observation, interviews, and documentation, with the objective of describing the phenomena or activities undertaken in seeking and locating the required Human Resources. The Decree of the Directorate General of Hajj and Umrah Organization No. 17 of 2019 concerning guidelines for Hajj recruitment in Indonesia governs PPIH recruitment in Saudi Arabia in 2019. In recruitment, two systems are used, such as the appointment system and the selection system. Nevertheless, because the increased quota for pilgrimage is entirely given to pilgrims, the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau province only utilises a selection system in its implementation in 2019. While in the selection system, the selection process is divided into three stages: administrative selection, CAT selection, and interview selection. The three stages have different percentages: administrative selection has a 30% percentage, CAT selection has a 55% percentage, and interview selection has a 15% percentage.

Keyword : *System, Recruitment, Hajj Organizing Committee in Saudi Arabia*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag;
2. Bapak Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi sekaligus Pembimbing Akademik (PA) dan dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi;
3. Bapak Zulkarnaini, M.Ag dan Dr. H. Achmad Ghozali, M.Si selaku penguji seminar proposal;
4. Bapak Perdamaian, M.Ag dan Rafdeadi, S.Sos.I.,M.A selaku penguji ujian komprehensif;
5. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si (Ketua/Penguji I), Khairuddin, M.Ag (Sekretaris/Penguji II), Zulkarnaini, M.Ag (Penguji III) dan Drs. H. Darusman, M.Ag (Penguji IV) selaku penguji sidang/ujian Munaqasyah fakultas Dakwah dan Komunikasi;
6. Bapak Drs. H. Syahrudin, M.Sy, selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kepala seksi beserta staff-staff bidang haji dan umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh dan memberikan data yang penulis perlukan;
7. Bapak Mashuri (Alm) dan Ibu Wakingah, yang telah memberikan doa, *support* dan telah memfasilitasi penulis hingga saat ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
9. Teman-teman seperjuangan MD I-II A, MD III-IV C, MTHU C, dan semua mahasiswa Manajemen Dakwah yang telah banyak membantu penulis hingga saat ini; serta
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di UIN SUSKA RIAU, UNRI, dan UIR yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas semua kebaikan bapak, ibu dan teman-teman yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan penulis berharap atas kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Penulis

Joyo Susanto

NIM.11744102557

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	12
C. Konsep Operasional.....	25
D. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian	30
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Validitas Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ...	35
B. Letak Geografis	38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi Dan Misi.....	38
D. Struktur Organisasi	39
E. Uraian Tugas.....	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan	58
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Jamaah Haji 2016-2019	4
--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 2: Struktur Organisasi.....	41





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan salah satu ibadah umat islam yang mana dalam ibadah tersebut selalu dilaksanakan oleh umat islam yang mampu. Mampu dalam artian bahwa memiliki kemampuan dalam hal ekonomi, fisik, mental ataupun kemampuan dalam hal mengerjakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji berarti melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat yang ada di Arab Saudi pada waktu yang telah ditentukan.¹

Ibadah haji merupakan puncak pencapaian ritual seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala.² Rasulullah Shal lallahu'alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji setelah turun wahyu yakni dalam Al-qur'an surah Al-imran : 97

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : "... Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana." (QS. Al-Imran : 97)³

Perjalanan ibadah haji dari Indonesia di mulai sejak abad ke-12 dan sangat tergantung pada keadaan transportasi antara Nusantara dan Jazirah Arab. Hubungan antara dua wilayah yang terletak di Asia Tenggara dan Asia Barat di laksanakan melalui pelayaran perdagangan dan berkaitan erat dengan masuk dan berkembangnya islam di Indonesia.⁴

Perkembangan jumlah jamaah haji Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu semakin banyak umat islam yang memahami

¹ Imadudin Dede, *Mengenal Haji* (Jakarta : PT Mitra Aksara Panaitan, 2012), 5

² *Ibid.* 13.

³ Muhammad Shohib, *Al-qur'anul karim (Syaamil Qur'an)*, (Bandung : PT Sigma Iksamidya Arkanlima, 2009), 62.

⁴ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*. (Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan ibadah haji dalam agama islam, sehingga jamaah merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakannya dan jamaah semakin bertambah keinginan untuk beribadah dan mencari ilmu di tanah suci sehingga pada saat itu terdapat jamaah yang masih tetap tinggal di tanah suci, dan juga semakin mudah dan teraturnya perjalanan menuju tanah suci dalam melaksanakan ibadah haji sehingga jamaah semakin antusias dan berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji.⁵

Jumlah jamaah haji Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai *leading sector* bersama unsur-unsur terkait membentuk suatu kelompok Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Pembentukan ini bertujuan untuk menjamin pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji sehingga proses perjalanan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar, aman dan nyaman.⁶

Pembentukan PPIH di atur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang tersebut diatur oleh peraturan presiden nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. PPIH dari aparatur kementerian agama bepedoman pada tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai dengan PMA No. 10 Tahun 2010 yang di ubah dan disempurnakan dengan PMA No. 80 Tahun 2013. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terbagi menjadi 3, yaitu, PPIH pusat, PPIH Arab Saudi dan PPIH embarkasi.⁷

PPIH pusat bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan operasional PIH yang dilakukan oleh PPIH embarkasi dan PPIH Arab Saudi, sedangkan PPIH Arab Saudi bertanggung jawab memberikan pelayanan umum, bimbingan ibadah dan kesehatan serta perlindungan jamaah selama di tanah suci dan PPIH embarkasi bertanggung jawab melayani pemberangkatan dan

⁵ *Tbid.* 129-131

⁶ Ali Rokhmad, *Manajemen Haji, Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, (Jakarta : media dakwah, 2016), 387.

⁷ *Tbid.* 178-179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemulangan jamaah haji, pembinaan jamaah, pelayanan kesehatan serta perlindungan sejak berangkat hingga kembali kedaerah asal jamaah.⁸

Adapun petugas yang menyertai jamaah haji, melayani jamaah di kloter, membimbing ibadah jamaah selama di embarkasi, pada saat perjalanan ketanah suci, meliputi :⁹

- a) TPHI yang bertugas mengkoordinasikan pelayanan kepada jamaah haji, baik administrasi maupun manajerial.
- b) TPIHI yang bertugas mengkoordinasikan tata pelaksanaan ibadah haji di kloter termasuk pengawasan terhadap proses bimbingan, baik individu maupun kelompok bimbingan selama di embarkasi dan perjalanan ke Arab Saudi.
- c) TKHI yang bertugas mengkoordinasikan pelayanan kesehatan jamaah haji di kloter baik oleh dokter maupun paramedis/perawat.

Dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota dapat mengangkat petugas daerah yang menyertai jamaah haji yaitu terdiri dari : Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). Dalam beberapa tahun yang lalu Ditjen PHU meminta agar TPHD juga dapat mengakomodir para pembimbing dari unsur KBIH. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah di daerah masing-masing.

Untuk memperoleh haji yang mabrur setiap muslim harus dapat memiliki ilmu dan pengetahuan tentang ibadah haji. Sedangkan sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini yang ingin melaksanakan ibadah haji masih belum mengerti dan belum memahami ilmu dan tata cara melaksanakan ibadah haji. Untuk itu di perlukan tenaga kerja yang profesional yang mengerti dan memahami tentang pelaksanaan ibadah haji yang dapat membimbing jamaah untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur.

Adapun data jamaah haji dan jumlah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :¹⁰

⁸ *Tbid.* 179-180

⁹ *Tbid.* 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Tahun	Jumlah Jamaah	Jumlah PPIH Arab Saudi
1	2016	4008	2
2	2017	5043	5
3	2018	5036	5
4	2019	5320	10

Table I Jumlah Jamaah Haji 2016-2019

Pada tahun 2016 petugas haji baik kloter maupun non kloter harus melaksanakan tes di kementerian agama kabupaten/kota lalu hasil dari tes tersebut diserahkan ke kantor wilayah kementerian agama provinsi riau untuk di data petugas yang berhak mengikuti tes di tingkat provinsi. Pada tahun 2016 kantor wilayah kementerian agama merekrut 2 orang untuk dijadikan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi dengan jamaah haji berjumlah 4008 jamaah.¹¹

Pada tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan 2016 yang mana perekrutan petugas haji baik kloter maupun nonkloter dilakukan oleh kementerian agama kabupaten/kota lalu diserahkan kepada kanwil kementerian agama provinsi riau untuk diseleksi kembali, perbedaannya adalah terdapat peningkatan jamaah haji sebanyak 5043 jamaah haji.¹² Sedangkan menurut Abdul Wahid selaku kepala seksi pembinaan haji dan umrah perbedaan rekrutmen calon petugas haji antara tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah bahwasanya pada tahun 2018 tahap 2 ini dilakukan secara online menggunakan android masing-masing tanpa di sediakan perangkat oleh panitia rekrutmen.¹³

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, "Jumlah Jamaah Haji di Provinsi Riau 2017-2019" <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2020/04/01/94/jumlah-jamaah-haji-di-provinsi-riau-2017-2019.html> (Di akses pada tanggal 28 november 2020, Pukul 16.13)

¹¹ Hallo Riau.com, "2016, Kuota Haji Riau Tetap 4.008 jamaah" <https://www.halloriau.com/read-otonomi-76928-2016-02-01-2016-kuota-haji-riau-tetap-4008-jamaah.html> (Di akses pada tanggal 28 november 2020, Pukul 20.44).

¹² Riau Karya.com, "Rekrutmen Petugas Haji di Buka 18 April 2017", <https://riaukarya.com/read/detail/1196/regional/pekanbaru/rekrutmen-petugas-haji-dibuka-18-april-2017> (Di akses pada tanggal 30 november 2020, Pukul 22.17).

¹³ Liputan Oke.com, "192 Calon Petugas Haji Riau Jalani Seleksi Tahap Awal" <https://www.liputanoke.com/read-26010-2018-03-29--192-calon-petugas-haji-riau-jalani-seleksi-tahap-awal.html> (Di akses pada tanggal 1 desember 2020, Pukul 21.56).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Wahid selaku kepala seksi pembinaan haji dan umrah menurutnya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi pada tahun 2019 meningkat 100 persen, pada tahun-tahun sebelumnya provinsi riau hanya diberikan kuota sebanyak 5 orang petugas haji di Arab Saudi namun pada tahun 2019 provinsi riau mendapatkan kuota sebanyak 10 orang petugas haji Arab Saudi. Oleh karena itu kantor wilayah kementerian agama akan menerapkan sistem-sistem baru dan akan memperkenalkan sistem-sistem baru yang akan menjadi tanggung jawab petugas haji tersebut.¹⁴

Oleh karena itu, disini penulis tertarik untuk meneliti sistem rekrutmen pada tahun 2019 untuk mengetahui sistem-sistem baru dan penerapannya dalam proses rekrutmen.

Dalam sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) pemerintah membuat suatu aturan-aturan atau pedoman yang dapat di gunakan untuk merekrut calon petugas haji yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman rekrutmen petugas haji indonesia.¹⁵

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan rekrutmen petugas haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi pada tahun 2019 lalu, dengan berpedoman pada keputusan Ditjen PHU yang telah di tetapkan dan dengan menggunakan sistem-sistem yang di buat dalam merekrut petugas haji, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Di Arab Saudi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau”*.

B. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang di gunakan dalam judul skripsi ini supaya tidak di temukan perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan atau perbedaan dalam hal menginterpretasikannya. Untuk menghindari

¹⁴ RRI.co.id, “Kemenag Riau Segera Lakukan Rekrutmen Petugas Haji 2019 Berbasis Android” <https://rri.co.id/pekanbaru/daerah/636205/kemenag-riau-segera-lakukan-rekrutmen-petugas-haji-2019-berbasis-android> (Di akses pada tanggal 2 desember 2020, pukul 01.13).

¹⁵ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.

kemungkinan tersebut maka penulis merasa perlu membuat suatu penegasan pada istilah-istilah yang penulis gunakan dalam judul “Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Tahun 2019 Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau”. Berikut ini ada beberapa istilah yang akan penulis jelaskan, yaitu :

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau suatu pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁶ Implementasi yang penulis maksud disini adalah suatu aktivitas atau tindakan yang di lakukan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, bukan sekedar tindakan namun kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang telah di rencanakan .

2. Sistem

Sistem dapat di artikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, dan terpadu.¹⁷ Maksud dari sistem disini adalah suatu komponen-komponen untuk mengatur suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

3. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan suatu proses pencarian calon tenaga kerja atau pelamar, di mulai dengan mencari para pelamar hingga proses pelamar kerja di terima di perusahaan tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut Bernadin dan Russel rekrutmen merupakan suatu proses penemuan dan penarikan para pelamar yang tertarik dan memiliki kualifikasi terhadap lowongan yang di butuhkan.¹⁹ Rekrutmen yang penulis maksud disini

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi KE-3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 131.

¹⁷ Sutabri Tata, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2012), 10.

¹⁸ Abu Fahmi, at.al, *HRD Syariah : Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 158.

¹⁹ Ambar T. Sulistiyani Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep,Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu proses kegiatan dalam mencari tenaga kerja yang mampu dan sesuai dengan bidang kerja yang di butuhkan.

4. Sistem Rekrutmen

Sistem rekrutmen merupakan suatu perangkat yang di gunakan untuk mencari, menarik atau menemukan pelamar-pelamar atau para calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang efektif, efisien dan berkualitas.²⁰ Sistem rekrutmen yang penulis maksud disini adalah suatu aturan-aturan yang di buat dalam mencari atau menarik calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang kerja yang di butuhkan.

5. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) merupakan petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.²¹ Maksud dari PPIH di sini adalah seorang petugas yang dipilih oleh Kementerian Agama dan diberikan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pelayanan, keamanan dan perlindungan untuk jamaah haji. PPIH terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu PPIH pusat, PPIH embarkasi dan PPIH Arab Saudi.

PPIH pusat bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan operasional PIH yang dilakukan oleh PPIH embarkasi dan PPIH Arab Saudi, sedangkan PPIH Arab Saudi bertanggung jawab memberikan pelayanan umum, bimbingan ibadah dan kesehatan serta perlindungan jamaah selama di tanah suci dan PPIH embarkasi bertanggung jawab melayani pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, pembinaan jamaah, pelayanan kesehatan serta perlindungan sejak berangkat hingga kembali kedaerah asal jamaah.²²

²⁰ Abdi Fauji Hadiono, Isti Faiyatul Inayah, "Pengaruh Sistem Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Mutu Pendidikan Yayasan Pendidikan dan Sosial Pondok Pesantren Al-Fadl Banyuwangi," Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2, no. 1, (2020) : 191.

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler. 11

²² Ali Rokhmad, *Op.cit.* 179-180

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi yang memiliki fungsi dan tanggung jawab memberikan pelayanan umum, bimbingan ibadah dan kesehatan serta perlindungan jamaah selama di tanah suci.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tahun 2019 yang di bentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ?
2. Bagaimana implementasi dari sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tahun 2019 yang di lakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tahun 2019 oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi pada tahun 2019 yang di lakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

2. Manfaat penelitian

Dalam pembahasan mengenai implementasi sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tahun 2019 oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, maka penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat teoritis, manfaat akademis dan manfaat praktis :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Manfaat teoritis

Hendaknya penelitian ini dapat berguna khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca maupun akademis sebagai sumber ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan mengenai sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi dan implementasinya dari sistem rekrutmen yang di bentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

b. Manfaat akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan mengenai implementasi sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi secara menyeluruh.

c. Manfaat praktis

Hendaknya penelitian ini dapat memberikan suatu bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah dalam sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang penting dikarenakan memiliki fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dalam pembahasan dari masing-masing yang saling berkaitan dan beruntun serta memberikan atau menggambarkan secara lengkap dan sesuai dengan penelitian dan hasil-hasilnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis mengemukakan secara ringkas mengenai latar, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini berisi tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, letak geografis, visi misi, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Didalam bab ini penulis memberikan suatu kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu upaya penulis dalam melakukan sebuah penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji suatu penelitian. Di samping itu peneliti menggunakan kajian terdahulu untuk mencari perbandingan dan juga untuk mendapatkan inspirasi baru didalam membuat laporan dari suatu penelitian.

Dalam bagian ini peneliti memaparkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan menggunakan langkah ini, maka peneliti akan dapat melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi peneliti yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang memiliki suatu keterkaitan dengan kajian yang akan di lakukan ini antara lain :

1. Natasya Anggia yang berjudul *Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah Oleh Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019*.²³

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pendekatan makna, pengertian, konsep, dan lain-lain. Penelitian tersebut lebih menekankan pada tahap-tahap dalam proses seleksi petugas haji daerah yang nantinya akan di tempatkan di manapun sesuai dengan kesepakatan dari hasil rekrutmen tersebut.

2. Permaini yang berjudul *Sistem Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru*.²⁴

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk menyalidiki subjek secara alamiah dan tidak memaksa dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana subjek dalam berpikir dan bertindak dalam

²³ Natasya Anggia, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah Oleh Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019" (Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Yogyakarta, 2020)

²⁴ Permaini, "Sistem Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru" (Skripsi : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pekanbaru, 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari pembimbing ibadah haji. Skripsi tersebut membahas tentang sistem rekrutmen pembimbing ibadah haji dan perubahan-perubahan sistem dalam rekrutmen calon pembimbing ibadah haji di Kementerian Agama kota Pekanbaru.

3. Irwansyah, yang berjudul *Efektivitas Rekrutmen dan Seleksi Calon Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat 2018*.²⁵

Skripsi ini menerangkan tentang tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Jakarta Barat dalam rekrutmen dan seleksi calon Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu selain tempat penelitian yang berbeda, penelitian yang penulis laksanakan lebih menekankan pada sistem rekrutmen dan implementasinya dalam proses mencari dan menemukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan ibadah haji khususnya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi dan profesional pada masing-masing bidang yang telah ditentukan serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi.

B. Landasan Teori

1. Sistem

a. Pengertian Sistem

Sistem dapat di artikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, dan terpadu.²⁶

²⁵ Irwansyah, "Efektivitas Rekrutmen dan Seleksi Calon Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat 2018" (Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jakarta, 2018)

²⁶ Sutabri Tata, 'Ibid. 10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lukman Ahmad dan Munawir dalam bukunya *sistem informasi manajemen* Ada beberapa pengertian tentang sistem menurut para ahli, yaitu :²⁷

- 1) Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. (Ludwig, 1997)
- 2) Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan (A. Rapoport, 1997)
- 3) Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi (L. Ackoff, 1997)
- 4) Sistem merupakan bagian-bagian yang saling beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. (Gordon, B. Davis, 1995)

Sebuah sistem memiliki suatu bagian-bagian atau komponen yang terkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Model dasar dari sebuah sistem memiliki suatu data, masukan, aturan, pengolahan dan pengeluaran. Akan tetapi sistem ini dapat di jabarkan hingga menjadi sebuah database penyimpanan.²⁸

Dari uraian di atas sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Terdapat dua kelompok dalam mendefinisikan sistem yaitu dengan menekankan pada prosedurnya atau dengan menekankan pada komponen atau elemennya.²⁹

b. Jenis-jenis Sistem

Menurut Raymond McLeod, Jr. (2001) yang di muat dalam buku *Sistem Informasi Manajemen* karangan Lukman Ahmad dan Munawir, bahwa jenis-jenis sistem secara umum yaitu :³⁰

²⁷ Ahmad Lukman dan Munawir, *Sistem Informasi Manajemen*, (Aceh : Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), 2018), 2-3.

²⁸ *Ibid.* 12.

²⁹ Sutabri Tata, *Op.Cit.* 16-17.

³⁰ Ahmad Lukman, *Op.Cit.* 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Open-Loop System*, Sistem terbuka merupakan sistem yang tidak mempunyai tujuan atau sasaran, pengendalian mekanis dan feedback.
- 2) *Close-Loop System*, Sistem tertutup yaitu sistem yang mempunyai tujuan atau sasaran, pengendalian mekanis dan feedback.

c. Karakteristik Sistem

Model umum sistem adalah *input*, proses dan *output*. Konsep sebuah sistem sangat sederhana karena sistem memiliki beberapa masukan dan keluaran. Selain itu, sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mendefinisikan tentang sistem itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan karakteristik sistem adalah :³¹

a) Komponen Sistem (*Components*)

Suatu sistem memiliki sejumlah komponen yang saling berkaitan. Artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan dalam mencapai tujuan. Komponen tersebut disebut dengan sub sistem.

b) Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan sistem merupakan suatu daerah yang menjadi ruang lingkup antara sistem satu dengan sistem yang lainnya atau sistem yang ada di luar lingkungan.

c) Lingkungan Luar Sistem (*Environtment*)

Lingkungan luar sistem ini sangat berpengaruh pada sistem. Lingkungan luar sistem dapat menguntungkan dan juga dapat menyebabkan kerugian pada sistem tersebut. Dengan demikian, luar lingkungan sistem harus tetap di jaga dan di pelihara serta di kendalikan agar tidak menyebabkan kerugian pada sistem.

d) Penghubung Sistem (*Interface*)

Penghubung sistem merupakan suatu bentuk kerjasama antar subsistem, dengan kerjasama tersebut akan menjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan.

³¹ *Ibid.* 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Masukan Sistem (*Input*)

Masukan sistem merupakan suatu pengoperasian dengan menambahkan sebuah data atau energi untuk membantu menggerakkan sistem.

f) Keluaran Sistem (*Output*)

Dalam *Input* tentu akan menghasilkan *output*. Ketika sebuah data yang di masukkan ke dalam sistem maka akan menghasilkan sebuah informasi, informasi inilah yang di sebut dengan keluaran sistem (*Output*).

g) Pengolah Sistem (*Proses*)

Sebuah sistem yang mengubah *Input* menjadi *Output* tentunya memiliki sebuah proses yang harus di jalankan.

h) Sasaran Sistem (*Objective*)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat *deterministic*. Suatu sistem di katakan berhasil apabila sistem tersebut mencapai suatu tujuan yang telah di rencanakan.

d. Tujuan Sistem

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang akan di capai oleh sistem tersebut. Sistem di ciptakan agar proses pelaksanaan sesuatu tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan, sistem di ciptakan juga untuk meminimalkan resiko kegagalan, maka target bisa tercapai secara efektif dan efisien.³²

sistem dibuat untuk mencapai tujuan (output) tertentu yang ingin dicapai. semua yang masuk ke dalam sistem akan diproses, baik itu obyek fisik maupun abstrak.

2. Rekrutmen

a. Pengertian Rekrutmen

Menurut Bernadin dan Russel rekrutmen merupakan suatu proses penemuan dan penarikan para pelamar yang tertarik dan memiliki

³² Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi, pemahaman konsep secara terpadu*. (Bandung : Lingga Jaya, 2017), 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualifikasi terhadap lowongan yang di butuhkan.³³ Rekrutmen merupakan suatu proses dalam mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan.³⁴

Rekrutmen merupakan langkah awal saat menentukan petugas haji sebelum pelaksanaan kegiatan operasional berlangsung. Beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli manajemen yaitu :³⁵

- 1) Mathis dan Jackson (2006) yang mengatakan bahwa rekrutmen merupakan suatu proses pemilihan orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang di butuhkan untuk menempati lowongan pekerjaan dalam sebuah organisasi.
- 2) Hadari Nawawi (2011) yang mengatakan bahwa rekrutmen suatu proses untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang memiliki kualitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang di butuhkan.

Tenaga kerja yang akan bekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus menguasai bidang pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tenaga kerja juga harus memiliki sebuah skill dalam artian bahwa tenaga kerja harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang kerja yang di embankan terebut.³⁶

Rekrutmen terjadi apabila dalam suatu organisasi atau perusahaan memerlukan seorang karyawan atau pegawai, dan terjadi karena adanya pekerjaan baru dalam perusahaan tersebut ataupun karena adanya karyawan yang berhenti bekerja sehingga posisi tersebut tidak ada yang mengerjakannya.

Rekrutmen pada dasarnya merupakan suatu proses menentukan dan menarik pelamar untuk bekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Proses ini di mulai ketika mencari seorang pelamar dan

³³ Ambar T. Sulistiyani Rosidah, *Op.Cit.* 134.

³⁴ Taufiqurokhman, *Op.Cit.* 20.

³⁵ Ali Rokhmad, *Op.Cit.* 182-183.

³⁶ *Ibid.* 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir saat lamaran tersebut di kumpulkan dan di terima oleh perusahaan.³⁷

b. Sumber-sumber Rekrutmen

Adapaun sumber-sumber rekrutmen menurut Taufiqurokhman dalam bukunya *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia* ada 2, yaitu:³⁸

1) Sumber Internal

Maksud dari sumber internal yaitu proses rekrutmen yang di lakukan oleh organisasi ataupun perusahaan dengan cara menarik karyawan yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan untuk menempati posisi yang di butuhkan. Keuntungan yang di peroleh adalah dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang lebih besar disamping itu karyawan juga sudah terbiasa dengan suasana perusahaan tersebut.

2) Sumber Eksternal

Sumber eksternal yaitu suatu proses merekrut karyawan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan, yaitu dengan cara pelamar yang datang dan menulis laporannya sendiri, rekomendasi dari karyawan lain ataupun pelamar lain yang berasal dari luar lingkungan perusahaan tersebut

c. Tujuan Rekrutmen

Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan seorang pelamar yang berkualitas. Tujuan pasca pengangkatan perlu dipikirkan, proses rekrutmen harus menghasilkan karyawan yang memiliki kemampuan serta keahlian dalam pelaksanaan yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang ditetapkan atau sesuai perjanjian.³⁹

³⁷ Taufiqurokhman, *Op.Cit.* 54.

³⁸ *Ibid.* 55-56.

³⁹ M Setiadi Hartoko, "Rekrutmen calon Karyawan Tetap (Studi Kasus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pasar Minggu)," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2, (Summer 2016) : 123

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prinsip-prinsip Rekrutmen

Proses rekrutmen dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Tetapi suatu organisasi atau perusahaan dapat memilih untuk menggunakan suatu prinsip dengan adanya alasan atau pertimbangan yang tepat.⁴⁰ Berikut ini adalah sejumlah dasar pertimbangan memilih yang akan digunakan :

- 1) Kriteria atau jumlah karyawan sesuai untuk posisi yang dibutuhkan
- 2) Kemudahan masalah administrative
- 3) Masalah waktu
- 4) Ketepatan hasil
- 5) Biaya

e. Hambatan dan Tahapan Rekrutmen

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen, yaitu :⁴¹

- 1) Gaji, menurut Soekidjo Notoatmojo dalam buku pengembangan Sumber Daya Manusia (2009) mengatakan bahwa “gaji tidak otomatis menaikkan produktivitas kerja. Gaji memang secara instan menaikkan semangat, memompa motivasi kerja, namun produktivitas yang tinggi tidak datang dari sekedar semangat yang menggebu-gebu”.
- 2) Insentif menurut Justine T. Sirait, Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam organisasi, (2006). “Menyatakan Insentif merupakan bentuk kompensasi yang punya kaitan langsung dengan motivasi, insentif diberikan tergantung dari prestasi atau produksi pegawai dan diberikan untuk mendorong pegawai agar lebih giat bekerja dan biasanya diberikan pada pegawai yang mudah diukur prestasi atau produktivitasnya secara satuan”

⁴⁰ Garry Dessler, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT. Macana jaya Cemerlang, 2008), 155.

⁴¹ M. Setiadi Hartoko, *Op.cit.* 124.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam rekrutmen calon karyawan, adalah sebagai berikut :⁴²

- 1) Permintaan Penggunaan
- 2) Pemasangan Iklan
- 3) Seleksi Surat Lamaran
- 4) Menghubungi Calon Kandidat Via Telepon
- 5) Wawancara
- 6) TesPenerimaan Kandidat
- 7) Perjanjian Kerja

3. Sistem Rekrutmen

Sistem rekrutmen merupakan suatu perangkat yang di gunakan untuk mencari, menarik atau menemukan pelamar-pelamar atau para calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang efektif, efisien dan berkualitas.⁴³

Menurut Simamonga (1997) dalam jurnal denny bahwa dalam menciptakan suatu sistem rekrutmen yang efektif, setidaknya perlu menerapkan beberapa hal, antara lain yaitu :⁴⁴

- a. Mendiagnosis se-efektif mungkin faktor-faktor lingkungan dan organisasional yang mempengaruhi posisi yang perlu di isi.
- b. Membuat deskripsi, spesifikasi dan standar kinerja yang rinci.
- c. Menentukan kriteria-kriteria rekrutmen dan kriteria kemampuan tenaga kerja untuk menempati posisi yang di butuhkan.
- d. Mengevaluasi berbagai saluran dan sumber rekrutmen.
- e. Menyeleksi sumber rekrutmen untuk memudahkan dan meminimalisir biaya.
- f. Menyusun rencana rekrutmen yang mencakup daftar aktivitas dan daftar untuk menerapkannya.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdi Fauji Hadiono, Isti Faiyatul Inayah, *Op.cit.* 191.

⁴⁴ Deni, *Rekrutmen (Recruitment) Karyawan : definisi, tujuan, proses dan sistem rekrutmen* <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/11/rekrutmen-recruitment-karyawan-definisi.html> (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 03.27).

4. Penyelenggara Ibadah haji (PIH)

Undang-undang No. 17 Tahun 1999 yang berisi 16 Bab 30 Pasal yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Dari pernyataan ini dapat di pahami bahwa UU tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan suatu wujud jaminan atas kemerdekaan Warga Negara Indonesia.⁴⁵

Sekitar 9 tahun kemudian muncul kesadaran bahwa UU. No. 17 Tahun 1999 masih belum cukup untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat indonesia di era reformasi ini. Lalu keluarlah Undang-undang No. 13 Tahun 2008 yang secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan ibadah haji dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Meski penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi masyarakat tetap di dorong dalam partisipasinya untuk bersama-sama mensukseskan keberhasilan hajatan nasional tersebut.

Ada beberapa prinsip yang harus di laksanakan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji, yaitu :⁴⁶

- a. Mengedepankan kepentingan jamaah
- b. Memenuhi rasa keadilan
- c. Memberi kepastian
- d. Mengedepankan sahnya ibadah
- e. Efisien dan transparan
- f. Prinsip nirlaba
- g. Keterbukaan

⁴⁵ Ali Rokhmad, *Op.cit.* 70-71.

⁴⁶ Ali Rokhmad, *Ibid.* 76-79.

5. Pengertian Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

Petugas haji adalah seorang yang di tetapkan untuk melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan ibadah haji atau yang disebut dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) pusat, embarkasi dan Arab Saudi.⁴⁷

Personalia PPIH Pusat, Embarkasi dan Arab Saudi di tetapkan dalam keputusan Menteri Agama atau Ditjen PHU. Dalam kaitannya dengan ini Gubernur atau Bupati dan Walikota dapat membentuk PPIH untuk membantu tugas di masing-masing daerah.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) merupakan petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.⁴⁸

PPIH dari aparaturnya Kementerian Agama berpedoman pada tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai dengan PMA No. 10 Tahun 2010 yang di ubah menjadi PMA No. 80 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Sedangkan ruang lingkup PPIH baik dari pusat, daerah dan Arab Saudi adalah untuk memberikan pelayanan secara umum, pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan kesehatan terhadap jamaah haji sesuai dengan cakupan wilayah atau daerah masing-masing.⁴⁹

6. Unsur-unsur Penetapan panitia Penyelenggara Ibadah haji (PPIH)

Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) terdiri dari 2 unsur, yaitu:

- 1) Aparatur Kementerian Agama, khususnya Ditjen PHU, bidang haji dan umrah pada Kanwil Kementerian Agama provinsi, dan Seksi PHU pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 2) Tim ad hoc (kepanitiaan), yang di bentuk oleh menteri agama dan menteri kesehatan, petugas ini terdiri dari petugas kloter, petugas embarkasi dan petugas non-kloter.

⁴⁷ *Ibid.* 177.

⁴⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler. 11.

⁴⁹ Ali Rokhmad, *Op.cit.* 178-179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 18 ayat (7) menyatakan bahwa petugas haji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.

Untuk itu rekrutmen petugas haji berdasarkan UU No 13 Tahun 2008 lalu diatur oleh Peraturan Presiden No 79 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2013 yaitu melalui sistem penunjukan dan sistem seleksi

Sistem penunjukan meliputi Amirul Hajj, penanggungjawab dan wakilnya, koordinator, pengendali teknis, ketua PPIH Arab Saudi, wakil ketua, sekretaris, kepala bidang, kadaker, kepala seksi dan pegawai Ditjen PHU Pusat dan pegawai bidang haji di Kanwil provinsi serta petugas khusus yang ditunjuk oleh Ditjen PHU.

Sedangkan bagi petugas haji yang mengikuti seleksi, pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Ditjen PHU yang ditetapkan setiap tahun terkait pedoman rekrutmen petugas haji Indonesia yang setiap tahunnya dilakukan penyempurnaan. Pada tahun 2019 penyelenggaraan rekrutmen diatur dalam Keputusan Ditjen PHU No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.

Pelaksanaan rekrutmen petugas haji kloter dan non-kloter diawali ditingkat daerah yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota kemudian peserta rekrutmen yang lulus ditingkat kabupaten/kota kembali menjalani seleksi ditingkat Kanwil provinsi

Petugas haji non-klote atau Pantia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terbagi menjadi 3, antara lain yaitu : ⁵⁰

- a. PPIH Pusat
- b. PPIH wilayah (embarkasi dan non-embarkasi)
- c. PPIH Arab Saudi

⁵⁰ Ibid. 179-180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPIH Pusat merupakan PPIH yang bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh PPIH wilayah (embarkasi dan non-embarkasi) dan PPIH di Arab Saudi. Sedangkan PPIH wilayah (embarkasi dan non-embarkasi) bertugas dan bertanggung jawab melayani pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, pembinaan jamaah, pelayanan kesehatan dan perlindungan ketika berada di tanah air.

PPIH Arab Saudi merupakan PPIH yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan umum, bimbingan ibadah dan kesehatan serta perlindungan jamaah haji selama berada di tanah suci. PPIH dibentuk di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi dan di Arab Saudi oleh Direktur Jenderal PHU. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji terdiri atas unsur Kementerian Agama, Kementerian atau instansi terkait dan atau pemerintah daerah.

Rekrutmen petugas haji menurut Dirjen PHU sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen PHU no. 54 tahun 2019 tentang petunjuk teknis rekrutmen petugas haji indonesia tahun 2019 mengingat keputusan Ditjen PHU no 17 tahun 2019 tentang pedoman rekrutmen petugas haji indonesia tahun 2019, merupakan bentuk seleksi yang di lakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mendapatkan petugas haji yang akan melayani jamaah haji baik di tanah air, selama dalam perjalanan, di Arab Saudi sampai dengan kembalinya jamaah haji di tempat domisili.⁵¹

Berdasarkan keputusan Ditjen PHU No. 17 Tahun 2019 tentang pedoman rekrutmen petugas haji di Indonesia bahwa terdapat dua sistem yang digunakan dalam rekrutmen petugas haji Indonesia, yaitu sistem penunjukan dan sistem seleksi.⁵²

⁵¹ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji Indonesia

⁵² Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petugas haji di kelompokkan menjadi 2 macam, khususnya petugas haji / PPIH Arab Saudi, yaitu :⁵³

- 1) PPIH yang menyertai jamaah (petugas kloter)
- 2) PPIH yang menempati posisi *stasioner* (PPIH non-kloter)

Petugas yang menempati pos kepanitiaan di Arab Saudi berada di dalam Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, wilayah Daker Airport, Makkah dan Madinah. Komposisi petugas ini berasal dari aparat Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, instansi terkait dan tenaga musiman haji (temus).

Sedangkan petugas yang menyertai jamaah haji memiliki tugas melayani jamaah di kloter, membimbing ibadah jamaah selama di embarkasi ketika di perjalanan dan ketika di Arab Saudi. Petugas tersebut antara lain :⁵⁴

- 1) TPHI yang bertugas mengkoordinasikan pelayanan kepada jamaah haji, baik administrasi maupun manajerial (ketua kloter)
- 2) TPIHI yang bertugas mengkoordinasikan tata kelola pelaksanaan ibadah haji didalam kloter termasuk pengawasan terhadap bimbingan selama di embarkasi, ketika dalam perjalanan dan ketika di Arab Saudi
- 3) TKHI yang bertugas mengkoordinasikan pelayanan kesehatan jamaah haji di kloter, baik oleh dokter, paramedis ataupun perawat.

Dalam hal tertentu gubernur atau bupati/walikota dapat mengangkat petugas daerah yang menyertai jamaah haji, yaitu terdiri dari :

- 1) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
- 2) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

Beberapa tahun yang lalu Ditjen PHU meminta supaya TPHD juga dapat mengakomodir para pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Hal ini dilakukan agar peran TPHI benar-benar dapat meningkatkan kualitas pelayanan jamaah di daerah masing-masing. Sedangkan biaya operasional PPIH dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

⁵³ Ali Rokhmad, *Op.cit.*

⁵⁴ *Ibid.* 181.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini berkenaan dengan implementasi sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya suatu mekanisme sistem.⁵⁵

Rekrutmen petugas haji menurut Ditjen PHU sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen PHU no. 54 tahun 2019 tentang petunjuk teknis rekrutmen petugas haji indonesia tahun 2019 mengingat keputusan Dirjen PHU no 17 tahun 2019 tentang pedoman rekrutmen petugas haji indonesia tahun 2019, merupakan bentuk seleksi yang di lakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mendapatkan petugas haji yang akan melayani jamaah haji baik di tanah air, selama dalam perjalanan, di Arab Saudi sampai dengan kembalinya jamaah haji di tempat domisili.

Berdasarkan keputusan Ditjen PHU No. 17 Tahun 2019 tentang pedoman rekrutmen petugas haji di Indonesia bahwa terdapat dua sistem yang digunakan dalam rekrutmen petugas haji Indonesia, yaitu sistem penunjukan dan sistem seleksi.

Implementasi yang di laksanakan tentu tidak boleh menyimpang dari sistem yang ada, karena sesuatu itu tidak dapat di katakan baik apabila tidak sesuai dengan sistem atau aturan yang telah di sepakati.

Dari pemaparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa implementasi dapat di katakan baik sesuai dengan rencana apabila berjalan sesuai dengan sistem atau aturan yang telah di berikan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori berdiplomasi dengan berbagai faktor yang telah di ketahui sebagai masalah yang penting.⁵⁶

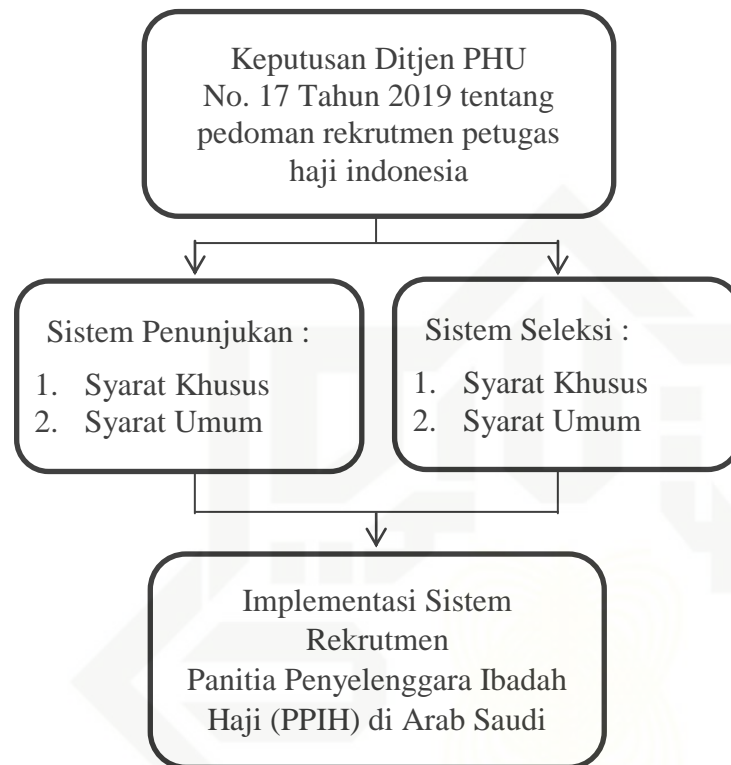
⁵⁵ Nurdin Usman, *Op.cit.* 70.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kerangka pemikiran yang dapat penulis gambarkan adalah sebagai berikut :





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan desain atau metode dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Loxy J. Moleong yang menyatakan bahwa desain penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu desain dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen-dokumen atau arsip dan dapat dilakukan dengan lisan atau wawancara secara langsung dari instansi atau pihak yang bersangkutan dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁷

Pengumpulan data yang berasal dari informan bermaksud untuk memahami fenomena yang telah terjadi, baik itu perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan yang dilakukan.⁵⁸

Metode kualitatif yang penulis maksud yaitu penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk memaparkan dan meringkas berbagai hal yang terjadi dalam melaksanakan sistem rekrutmen di dalam instansi yang menjadi objek penelitian dan berusaha untuk memaparkan realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, sifat, karakter, model atau gambaran tentang kondisi dan situasi dalam kegiatan tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 235 kota Pekanbaru.

Sedangkan waktu penelitian yang penulis laksanakan yaitu selama 6 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 – 09 Juni 2021.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

⁵⁸ *Ibid.* 6.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan yang bersumber baik melalui wawancara kepada pimpinan dan karyawan maupun tanya jawab terhadap informan penelitian untuk memperoleh keterangan data yang lebih jelas.⁵⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, dan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah dan dokumen-dokumen resmi.⁶⁰

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang dapat memberikan informasi-informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang masalah yang akan di teliti.⁶¹

Informan Penelitian pada penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yaitu sebagai berikut :

1. Bapak H. Rahmad Suhadi, S.H., M.Pd selaku Kepala Seksi (Kasi) Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji
2. Bapak Santoso, selaku Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tahun 2019 bidang konsumsi
3. Bapak Syaiful Bahri, selaku Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tahun 2019 bidang akomodasi
4. Bapak Hari Kurniawan, selaku Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tahun 2019 bidang transportasi.

⁵⁹ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang : Suka Bina Press, 2016), 36.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ John, W. Best, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), 204.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ini berarti peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian⁶² tentang implementasi sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Informasi yang didapat dari observasi berupa pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa pada lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku, kejadian, atau kegiatan yang di laksanakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses percakapan yang di lakukan antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai dengan maksud dan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan dapat di lakukan dengan bertatap muka ataupun dengan bantuan alat komunikasi lain.⁶³ Jadi penulis melakukan tanya jawab kepada pihak instansi yang bersangkutan untuk di mintai keterangan baik secara langsung ataupun dengan bantuan alat komunikasi lain.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang penulis lakukan dalam mencari sebuah data baik melalui arsip, berkas-berkas, catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen lain termasuk tentang teori atau pendapat yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶⁴

⁶² Eri Barlian, *Op.cit.* 39.

⁶³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara psikodiagnostik*, (Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera, 2016), 3.

⁶⁴ Eri Barlian, *Op.cit.* 50.

F. Validitas Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu validasi data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui validasi data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Validitas data merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keabsahan data. Data yang sudah diperoleh perlu diseleksi sebagai bahan masukan untuk ditarik sebuah kesimpulan. Dengan begitu bisa mengetahui data yang salah dan data yang benar.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan kevalidan dari data yang dilakukan yaitu dengan :⁶⁵

1. Triangulasi Data

Triangulasi data memiliki upaya untuk mengecek kebenaran data. Triangulasi membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan dengan waktu dan metode yang berlainan. Triangulasi data yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori data. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mengajukan berbagai variasi pertanyaan
- Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara
- Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- Memanfaatkan berbagai metode untuk pengecekan data dapat dilakukan.

2. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu-waktu akan diadakan analisis dan penafsiran data.

⁶⁵ Lexy, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Karya, 2007),

3.

Meningkatkan Ketekunan

Peneliti perlu melakukan penelitian secara cermat dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan melakukan pengecekan ulang, agar data yang diperoleh tidak mengalami kesalahan.

G. Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan merealisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berisikan dengan fenomena yang bersangkutan.

Langkah-langkah analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan di rumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara eksplisik.

c) Analisis Perbandingan (*Comparative*)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

d) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan⁶⁶

⁶⁶ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), 107.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama (saat ini Kementerian Agama) pada Juni 1946, dalam perjalanannya hingga saat ini selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi yang berpusat di Tanjung Pinang Provinsi Riau. Selanjutnya, dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960 dengan kegiatan bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958. (saat ini PMA RI Nomor 13 Tahun 2012).⁶⁷

Kantor Wilayah Departemen Agama (Kementerian Agama) Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya.

Kantor Wilayah Kementarian Agama Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Kakanwil Drs. H. Mahyudin MA adalah salah satu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah Kementerian Agama RI

⁶⁷ Imuss, "Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau" <https://riau.kemenag.go.id/artikel/39494/Sejarah-Kementerian-Agama-Provinsi-Riau> (Di akses Pada tanggal 7 Desember 2020, Pukul 16.15)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(Pusat) yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari segi struktur termasuk dalam kategori Tipologi I-A dengan susunan personalia terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, Kepala Bidang Urusan Islam dan Pembinaan Syariah, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Pembimbing Kristen, Pembimbing Katolik, Pembimbing Hindu, Pembimbing Buddha dan dilengkapi dengan Kasubbag- kasubag dan Kasi-kasi yang melaksanakan tugas-tugas harian sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota provinsi, saat ini memiliki 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kota Dumai Kepala
3. Kabupaten Kampar
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu
6. Kabupaten Indragiri Hulu
7. Kabupaten Kuantan Singingi
8. Kabupaten Indragiri Hilir
9. Kabupaten Bengkalis
10. Kabupaten Siak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kabupaten Rokan Hilir

12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki 11 Kakanwil dari Masa ke Masa, yaitu :

1. Bakri Sulaiman (1946- 1959)
2. Nurdin Abdul Jalil (1959- 1973)
3. H. Zakaria Mustafa (1973- 1978)
4. H. Ismail Makky (1978- 1984)
5. H. Ismail Manany (1984- 1991)
6. H. Mukhtar Samad (1991- 1997)
7. H. M. Rasyid Hamidi (1997- 2001)
8. H. Abdul Gafar Usman, M. Sc (2001- 2009)
9. H. Asyari Nur, SH, MM (2009- Juni 2012)
10. H. Tarmizi Tohor MA (Juni 2012- 21 Februari 2016)
11. H. Mahyudin, MA (Februari 2016- sekarang)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan program-program prioritas dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan serta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Riau. Capaian Program tersebut antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Visi Pemerintah Provinsi Riau yaitu : Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020.
2. Menetapkan standarisasi pelayanan publik.
3. Menciptakan Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara ummat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Letak Geografis

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terletak di jalan Jendral Sudirman no. 235

Adapun letak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau batasnya adalah sebagai berikut :⁶⁸

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Sebelah Utara | : Gedung Kementrian Hukum dan HAM |
| 2. Sebelah Timur | : RS. Bhayangkara Polda Riau |
| 3. Sebelah Selatan | : Gedung Dinas Sosial Provinsi Riau |
| 4. Sebelah Barat | : Gedung DPRD Kota Pekanbaru |

C. Visi dan Misi

Untuk mencapai suatu tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama telah menetapkan visi dan misi melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau nomor 113 tahun 2005 tentang penetapan suatu visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian di perbaharui pada tahun 2009. Adapun Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, adalah :⁶⁹

⁶⁸ Observasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.

⁶⁹ Dokumentasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Terwujudnya Masyarakat Provinsi Riau Yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri”.

Sedangkan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang taat menjalankan ajaran agamanya
2. Meningkatkan tatanan masyarakat yang rukun dan toleran
3. Meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan madrasah, pendidikan, agama dan pendidikan keagamaan yang handal dan koperatif
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Visi dan Misi yang tercantum di atas di lengkapi dengan Tema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja, yaitu :

Tema Kerja : Ciptakan image yang sempurna

Motto Kerja : Ramah, amanah dan tegas

Sifat Kerja : Sungguh-sungguh, teliti dan kreatif

Tujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan Visi dan Misi yang sudah tercantum di atas adalah Terwujudnya masyarakat provinsi riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar dan intern umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan organisasi dan individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas. Sehingga diharapkan setiap satuan-satuan dalam instansi atau organisasi dapat bekerja sama dengan baik.

Struktur organisasi dalam sebuah instansi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh instansi yaang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagian instansi juga dengan mudah dapat dilihat banyak instansi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan dengan bagian organisasi tersebut.

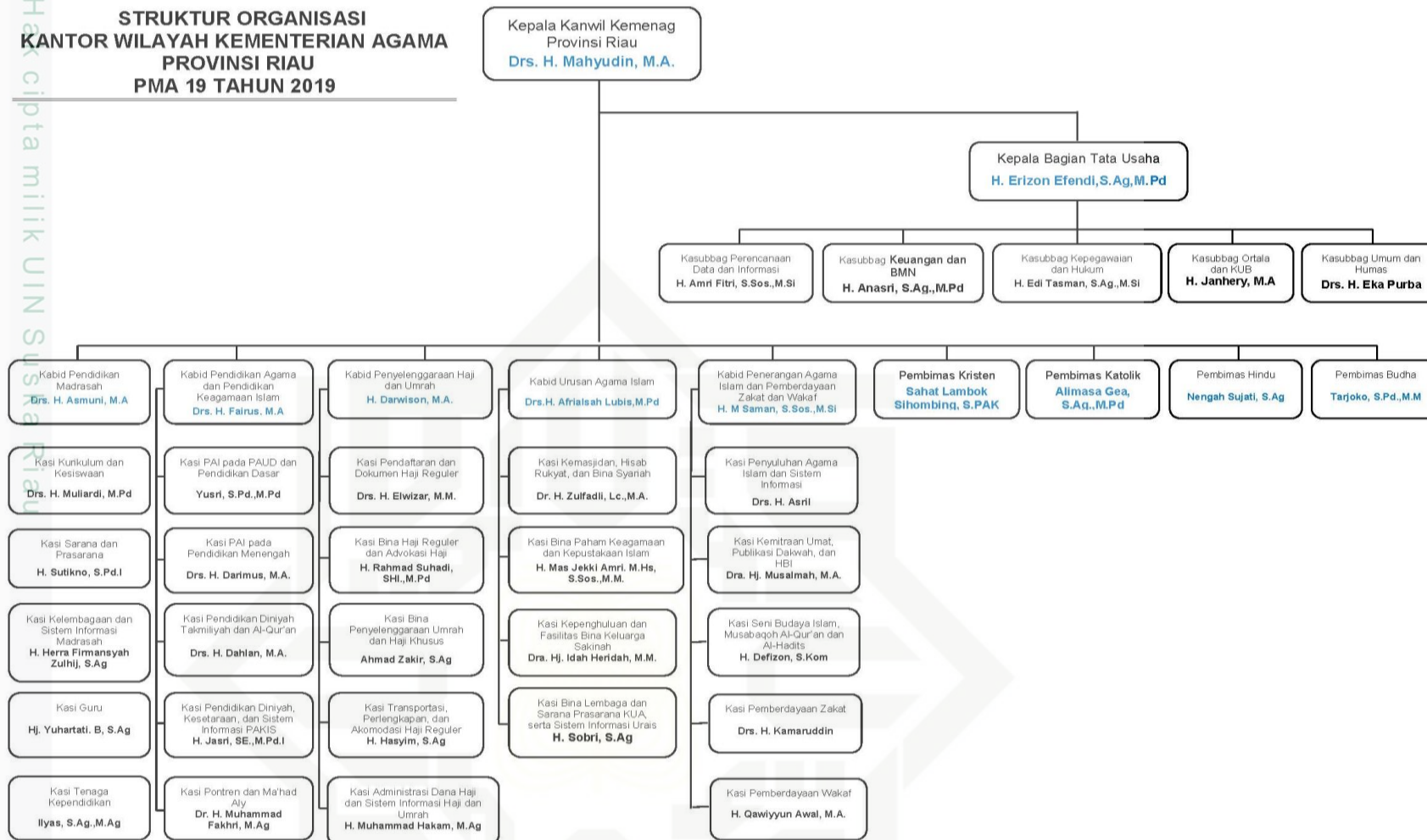
Struktur organisasi sangat penting, mengingat pembentukan struktur instansi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas, menengah maupun tingkat bawah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang di pimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau (KAKANWIL), dan memiliki 1 Kepala Bagian dan 5 Kepala Sub Bagian selain itu juga memiliki 5 Kepala Bidang yang mana di masing-masing bidang tersebut memiliki 5 Kepala seksi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri.⁷⁰

⁷⁰ Dokumentasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU PMA 19 TAHUN 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

E. Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian dan bidang yang ada di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau adalah sebagai berikut :⁷¹

1. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di pimpin oleh bapak Drs. H. Mahyudin, MA.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha melakukan tugas perumusan kebijakan teknis dan tugas pembinaan di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakna teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
- 2) Subbagian Keuangan dan BMN
- 3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum
- 4) Subbagian Organisasi Tata Laksana dan KUB
- 5) Subbagian Umum dan Humas

3. Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Perencanaan Data dan Informasi Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana program, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan sistem Informasi Keagamaan.

4. Bagian Keuangan dan BMN

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara

⁷¹ Dokumentasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagian Unit Pelayanan Kepegawaian dan Hukum

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang Kepegawaian seperti Pelaksanaan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan untuk perencanaan kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah, melayani dan mengurus dan membina CPNS dan PNS, Pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka pengembangan karier pegawai, penghargaan, tanda jasa, dan informasi masa purna tugas/ pensiun. Selain itu juga melakukan pelayanan bidang hukum seperti pengurusan SK dan lain-lain.

6. Bagian Ortala dan KUB

bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. .

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Organisasi Tata Laksana dan KUB mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penataan kelembagaan dan analisa jabatan
- 2) Pemberian bantuan teknis tata laksana kepada seluruh perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Penyiapan petunjuk/pedoman kerja dan melaksanakan pembinaan tata naskah bagi satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah
- 4) Perumusan kebijakan, rencana operasional di bidang kerukunan umat beragama
- 5) Pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan
- 6) Koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah kerukunan umat beragama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bagian Umum dan Humas

bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

8. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan madrasah;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Dalam bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari beberapa seksi, antara lain yaitu :

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana
- 3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
- 4) Seksi Guru
- 5) Seksi Tenaga Kependidikan

9. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.

Dalam bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1) Seksi PAI pada PAUD & Pendidikan Dasar
 - 2) Seksi PAI Pendidikan Menengah
 - 3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-qur'an
 - 4) Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan Sistem Informasi PAKIS
 - 5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma'had Aly
10. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler
- 2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji
- 3) Seksi Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus
- 4) Seksi Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler
- 5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah

11. Bidang Urusan Agama Islam

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

Dalam bidang Urusan Agama Islam & Pemberdayaan Syariah terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah
- 2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam
- 3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana KUA, Serta Sistem Informasi URAIS

12. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Qur'an dan Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdiri dari :

- 1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi
- 2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan HBI
- 3) Seksi Seni Budaya Islam, Musaaqah Al-qur'an dan Al-hadits
- 4) Seksi Pemberdayaan Zakat
- 5) Seksi Pemberdayaan Wakaf

13. Pembimbing masyarakat Kristen

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pembimbing masyarakat Katolik

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Adapun tugas Pembimas Katolik di antaranya :

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan, Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dalam Kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Umat Katolik
- 3) Memberdayakan Umat Beragama Katolik dan Lembaga Keagamaan Katolik untuk Kemajuan Bangsa dan Negara
- 4) Mengembangkan Keselarasan Pemahaman Keagamaan Katolik dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.
- 5) Memberikan Kesempatan kepada Pembina/Pendidik, untuk meningkatkan hingga Mutu dan Kualitas Kompetensi dan Profesionalisme Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
- 6) Meningkatkan kualitas Tata kelola Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat.
- 7) Meningkatkan SDM Aparatur Negara

15. Pembimbing masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- 1) Menetapkan Visi, Misi Dan Kebijakan Teknis Di Bidang Hindu
- 2) Merumuskan Standardisasi, Norma, Pedoman, Kriteria Dan Prosedur Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 3) Melaksanakan Kebijakan Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 4) Memberikan Pembinaan Teknis Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Melaksanakan Administrasi Direktorat Jenderal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Pembimbing masyarakat Budha

Pembimbing Masyarakat Budha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- 1) Perumusan kebijakan, di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
- 2) Pelaksanaan Kebijakan, administrasi di bidang Bimas Buddha
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji di Indonesia menyatakan bahwa dalam rekrutmen petugas haji di Indonesia menggunakan dua sistem yaitu sistem penunjukan dan sistem seleksi.

Sistem penunjukan merupakan sistem yang dilakukan di waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Sistem penunjukan dilakukan apabila terdapat penambahan kuota jamaah haji yang diberikan oleh pihak Arab Saudi umumnya diberikan pada bulan Ramadhan. Pada tahun 2019 terdapat penambahan kuota jamaah haji sebanyak 295 namun untuk provinsi Riau kuota jamaah haji seluruhnya diberikan kepada jamaah haji sehingga provinsi Riau tidak melakukan sistem penunjukan untuk memberikan tambahan petugas haji.

Selain sistem penunjukan dalam rekrutmen petugas haji di Indonesia juga terdapat sistem seleksi. Terdapat 3 (tiga) tahap dalam sistem seleksi, yaitu :

1. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi yaitu seleksi berkas-berkas yang berhubungan dengan tujuan rekrutmen. Dalam rekrutmen PPIH di Arab Saudi seleksi administrasi memiliki persentase 30% dan diutamakan bagi pegawai yang pernah bertugas menjadi PPIH atau pegawai yang bertugas pada bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam implementasinya seleksi administrasi diikuti oleh 30 calon PPIH dan sebanyak 24 calon PPIH yang dapat mengikuti tahap selanjutnya

2. Seleksi CAT (*Computer Assisted Test*)

Seleksi CAT (*computer assisted test*) merupakan seleksi dengan menggunakan media elektronik seperti *computer* dan *handphone*. Seleksi CAT dalam rekrutmen PPIH di Arab Saudi terdapat dua tahap seleksi yaitu seleksi berbasis android dan seleksi secara manual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Seleksi CAT berbasis android memiliki persentase 40% dengan mengisi soal-soal pilihan ganda pada android masing-masing dan di ikuti oleh 24 calon PPIH, dalam sistem ini sebanyak 8 calon PPIH yang tidak lulus sehingga jumlah calon PPIH menjadi 16 orang. Sedangkan seleksi secara manual atau pendalaman tugas untuk pengembangan dengan mengisi soal-soal *essay* dengan persentase 15%. Seleksi tersebut di ikuti oleh 16 calon PPIH namun yang akan dinyatakan tidak lulus dalam seleksi ini berjumlah 3 orang.

3. Seleksi wawancara

Seleksi wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung (*face to face*) antara peserta seleksi dengan panitia seleksi dan melakukan percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam sistem wawancara terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti panitia seleksi harus bersifat netral terhadap peserta seleksi dan harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya seleksi wawancara dilakukan oleh 13 calon PPIH dengan persentase sebanyak 15% sehingga sebanyak 10 calon PPIH yang akan di nyatakan lulus dalam seleksi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dilapangan, penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Bagi pihak lembaga

Seperti yang telah dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam rekrutmen PPIH memiliki beberapa sistem yaitu sistem penunjukan dan sistem seleksi. Penulis berharap dalam rekrutmen PPIH selanjutnya terdapat peningkatan kualitas rekrutmen baik dalam sistem penunjukan ataupun dalam sistem seleksi untuk mendapatkan petugas haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang profesional dan bertanggung jawab dan dengan selalu mementingkan prinsip transparan, obyektif dan akuntabel.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang sistem rekrutmen petugas haji di Indonesia khususnya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi, yaitu :

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang terkait dengan sistem rekrutmen agar hasil penelitian yang dilakukan dapat lebih baik dan lebih lengkap dalam membahas masalah yang diteliti.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dari berbagai hal sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk mengambil sumber-sumber yang terpercaya dan didukung dengan wawancara dari sumber yang kompeten pada bidang yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta : Darul Fikri, 2011.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang : Suka Bina Press, 2016.
- Best. John W. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, 1982
- Dede, Imadudin. *Mengenal Haji*. Jakarta : PT Mitra Aksara Panaitan, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi KE-3*. Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Dessler, Garry. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Macana jaya Cemerlang, 2008.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara psikodiagnostik*. Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- Fahmi, Abu. at.al. *HRD Syariah : Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Farid, Ishaq. *Ibadah Haji Dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999.
- Lukman, Ahmad. dan Munawir. *Sistem Informasi Manajemen*. Aceh : Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya, 2007.
- Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung : Pustaka Setia, 2003.
- Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta, PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Rahman, Marianti. *Ilmu Administrasi*. Makassar : CV. Sah Media, 2017
- Rokhmad, Ali. *Manajemen Haji, Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*. Jakarta : media dakwah, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Shohib, Muhammad. *Al-qur'anul karim (Syaamil Qur'an)*. Bandung : PT Sigma Iksamidya Arkanlima, 2009.
- Sugiyono. *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta, 2013.
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003.
- Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi, pemahaman konsep secara terpadu*. Bandung : Lingga Jaya, 2017.
- Tata, Sutabri. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2012.
- Taufiqurokhman. *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama, 2009.

Jurnal

- Fauji Hadiono, Abdi dan Faiyatul Inayah, Isti. 2020. *Pengaruh Sistem Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Mutu Pendidikan Yayasan Pendidikan dan Sosial Pondok Pesantren Al-Fadl Banyuwangi*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam : Vol. 2 No. 1 Tahun 2020
- Mardiah, Nila. 2016. *Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam : Vol. 4, No 2
- Setiadi Hartoko, M. 2016. *Rekrutmen calon Karyawan Tetap (Studi Kasus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pasar Minggu)*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis : Vol. 4 No. 2
- Widiawati dan Hairil Kurniadi Siradjuddin, 2020. *Perancangan Website Sistem Seleksi Siswa Baru Menggunakan Framework Code Igniter Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalumpang Kota Ternate*, Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, 3, no. 2.

Skripsi

- Anggia, Natasya. 2020. *Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah Oleh Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019*. Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jurusan Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Irwansyah. 2018. *Efektivitas Rekrutmen dan Seleksi Calon Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat 2018*. Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jurusan Manajemen Dakwah. Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Permaini. 2013. *Sistem Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru*. Skripsi : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.



Jurusan Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru

Undang-undang

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji Indonesia

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler

Peraturan Presiden, No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Undang-undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Website/internet

Deni. 2010. *Rekrutmen (Recruitment) Karyawan : definisi, tujuan, proses dan sistem rekrutmen* <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/11/rekrutmen-recruitment-karyawan-definisi.html> (Di akses pada tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 03.27).

Hallo Riau.com. 2016. "2016, Kuota Haji Riau Tetap 4.008 jamaah" <https://www.hallor Riau.com/read-otonomi-76928-2016-02-01-2016-kuota-haji-riau-tetap-4008-jamaah.html> (Di akses pada tanggal 28 november 2020, Pukul 20.44).

Imuss, "Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau" <https://riau.kemenag.go.id/artikel/39494/Sejarah-Kementerian-Agama-Provinsi-Riau> (Di akses Pada tanggal 7 Desember 2020, Pukul 16.15)

Liputan Oke.com. 2018. "192 Calon Petugas Haji Riau Jalani Seleksi Tahap Awal" <https://www.liputanoke.com/read-26010-2018-03-29--192-calon-petugas-haji-riau-jalani-seleksi-tahap-awal.html> (Di akses pada tanggal 1 desember 2020, Pukul 21.56).

Riau Karya.com. 2017. "Rekrutmen Petugas Haji di Buka 18 April 2017". <https://riaukarya.com/read/detail/1196/regional/pekanbaru/rekrutmen-petugas-haji-dibuka-18-april-2017> (Di akses pada tanggal 30 november 2020, Pukul 22.17).

RRI.co.id. 2019. "Kemenag Riau Segera Lakukan Rekrutmen Petugas Haji 2019 Berbasis Android" <https://rri.co.id/pekanbaru/daerah/636205/kemenag-riau-segera-lakukan-rekrutmen-petugas-haji-2019-berbasis-android> (Di akses pada tanggal 2 desember 2020, pukul 01.13).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto didepan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Santoso

Bapak Rahmad Suhadi, S.H., M.Pd

Foto bersama bapak Rahmad Suhadi, S.H., M.Pd selaku Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji dan Foto bersama bapak Santoso selaku Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) tahun 2019 bidang konsumsi



Foto bersama bapak Syaiful Bahri selaku Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2019 bidang akomodasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8707/2020
Sifat : Biasa
Hal : Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 18 Rabiul Akhir 1442 H
03 Desember 2020

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : JOYO SUSANTO
NIM : 11744102557
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Implementasi Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Di Arab Saudi Tahun 2019 Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n.
Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37153
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8707/2020 Tanggal 3 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

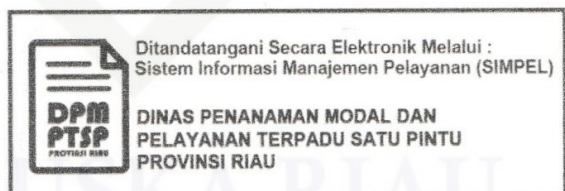
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | JOYO SUSANTO |
| 2. NIM /KTP | : | 11744102557 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI TAHUN 2019 OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagai sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru 28011
Telepon (0761)861827 Faksimile (0761)861827
Website : www.riau.kemenag.go.id

13 Januari 2021

Nomor : B- 13 Kw.04.1/5/PP.07/01/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data Untuk Skripsi

Yth. Sdr. Joyo Susanto
Mahasiswa Universitas Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di Pekanbaru

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37153 tanggal 10 Desember 2020, Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini kami memberikan Izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dengan judul penelitian :

**"IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH
HAJI ARAB SAUDI TAHUN 2019 OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU"**

Izin ini diberikan kepada :
Nama : JOYO SUSANTO
NIM/KTP : 11744102557
Program Studi : Manajemen Dakwah
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan, dimulai dari 10 Desember 2020

Pengambilan data untuk penelitian tersebut dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan serta mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Demikian surat izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terimakasih.



a.n. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha

Erizon Efendi

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFY PENULIS

JOYO SUSANTO_ Dilahirkan di kabupaten Indragiri Hilir – Riau, tepatnya di Sungai Terab II, dusun Darul Makmur, Desa Hidayah, Kecamatan Pelangiran, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 1999. Anak ke-tiga dari empat bersaudara, pasangan dari bapak Mashuri (Alm) dan Ibu Wakingah.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari MI Imam Puro (2005-2011) di Sungai Terab II desa Hidayah Kecamatan Pelangiran, lalu melanjutkan pendidikan di MTs Al-ikhlas (2011-2014) di Sungai Guntung Kecamatan Kateman, lalu penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-ikhlas Kateman Sungai Guntung, Kecamatan Kateman pada tahun 2014-2017. Setelah lulus pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) yang terletak di Kota Pekanbaru dengan mengambil jurusan/prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Ketika penulis masuk kedalam dunia pendidikan di MTs Al-ikhlas penulis juga aktif dalam dunia organisasi seperti organisasi *Volleyball*, rohis, pidato dan UKM-MTs Al-ikhlas, dan pada saat penulis masuk di MA Al-ikhlas penulis juga aktif dalam organisasi *Volleyball*, rohis, *Drumband*, Pramuka dan OSIS. Adapun prestasi penulis di antaranya pernah mengikuti MTQ tingkat kecamatan, perkemahan terpadu tingkat kabupaten, juara 2 LKBB dan juara 3 pentas seni tahun 2014 pada perkemahan penghijauan.

Dalam dunia Perguruan Tinggi Negeri (PTN) penulis juga pernah aktif dalam dunia perjuangan dan organisasi. Penulis pernah ikut bergabung dalam organisasi LDK Al-karamah pada tahun 2017-2018, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2018, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN SUSKA RIAU periode 2018-2019 bidang Kementerian Agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.